

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

Oleh
Shiwy Wulandari
NIM. 2205010043

ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi, keterbatasan jumlah juru pungut, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan retribusi yang berlaku. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan retribusi persampahan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta teori *good governance* menurut Sedarmayanti (2020) yang meliputi indikator akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek akuntabilitas, pelaksana kebijakan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku. Pada aspek transparansi dan keterbukaan, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, meskipun pemahaman masyarakat terhadap perubahan kebijakan dan mekanisme pembayaran masih belum merata. Sementara itu, pada indikator aturan hukum, kebijakan telah memiliki dasar regulasi yang jelas, namun penegakan sanksi terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan wajib retribusi belum dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek sosialisasi kebijakan, peningkatan pengawasan lapangan, serta penambahan jumlah juru pungut guna meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi persampahan dan mendukung penerapan prinsip *good governance* secara lebih optimal.

Kata Kunci: *Good Governance*, Implementasi Kebijakan, Kota Tanjungpinang, Retribusi Persampahan.

THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE WASTE MANAGEMENT RETRIBUTION POLICY IN TANJUNGPINANG CITY IN 2024

By:
Shiwy Wulandari
ID. 2205010043

ABSTRACT

The implementation of the waste management retribution policy in Tanjungpinang City still faces various challenges, such as low public compliance in paying retribution fees, the limited number of collection officers, and the uneven level of public understanding regarding the applicable retribution policy. These conditions affect the effectiveness of waste management retribution implementation and the implementation of good governance. This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the execution of the waste management retribution policy in Tanjungpinang City in 2024. The study employs a qualitative descriptive method with a case study approach and applies the good governance theory proposed by Sedarmayanti (2020), which includes the indicators of accountability, transparency, openness, and the rule of law. The results of the study indicate that, in terms of accountability, policy implementers have carried out their duties and responsibilities in accordance with the applicable administrative procedures. In terms of transparency and openness, the local government has conducted policy dissemination to the public, although public understanding of the policy changes and payment mechanisms remains uneven. Meanwhile, regarding the rule of law indicator, the policy already has a clear regulatory foundation; however, the enforcement of sanctions against violations and non-compliance by retribution payers has not been implemented consistently. Therefore, strengthening policy dissemination, enhancing field supervision, and increasing the number of collection officers are necessary to improve the effectiveness of waste management retribution collection and to support the more optimal implementation of good governance principles.

Key Words: Good Governance, Local Own-Source Revenue, Policy Implementation, Tanjungpinang City, Waste Management Retribution.